

UPAYA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYEDIAAN PEDESTRIAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA

Bianca Andriani Vianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
biancaandrvn@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Program Penyediaan pedestrian di Kota Surabaya merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dari tahun 2010 yaitu dilakukan pembenahan pedestrian pada jalan protokol di Kota Surabaya dengan secara bertahap dan memberikan fasilitas pedestrian untuk penyandang disabilitas. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas melalui fasilitas pedestrian yang telah disediakan seperti ramp, ubin pemandu, lantai landai. Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah kota Surabaya dalam penyediaan pedestrian yang layak untuk penyandang disabilitas dengan menggunakan empat kriteria asas fasilitas dan aksesibilitas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat dan tujuan belum sepenuhnya tercapai bahwa 1. Asas Kemudahan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas karena pemerintah memberikan fasilitas seperti ubin pemandu, ramp, lantai landai untuk penyandang disabilitas agar memudahkan dalam mengakses pedestrian. 2. Asas Kegunaan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya sudah cukup menciptakan kegunaan pedestrian. Hal tersebut dikarenakan masih adanya pedestrian yang beralih fungsi dan tidak seutuhnya digunakan oleh penyandang disabilitas di kota Surabaya. 3. Asas Keselamatan, dalam penyediaan pedestrian di Kota Surabaya fasilitas sudah cukup menjamin keselamatan bagi penyandang disabilitas karena fasilitas yang disediakan pemerintah masih belum sepenuhnya memenuhi syarat keselamatan masih ditemukan pedestrian yang rusak dan pedestrian yang memiliki ramp. 4. Asas Kemandirian, dalam pelaksanaannya pedestrian sudah cukup memberikan kemandirian untuk penyandang disabilitas karena dalam pelaksanaannya dibantu dengan Satpol PP dan Linmas kota Surabaya.

Kata Kunci : Upaya, Pedestrian, Disabilitas

Abstrack

Pedestrian provisioning program in Surabaya is a program made by the Government through the Public Works Department of Bina Marga and Pematusan Kota Surabaya from 2010, which is done by improving pedestrian on the protocol road in Surabaya City by gradually providing pedestrian facilities for persons with disabilities. The purpose of this program is to provide pedestrian accessibility especially for people with disabilities through pedestrian facilities that have been provided such as ramp, guiding tiles, sloping floors.. This research uses descriptive research with qualitative approach. This study focuses on Surabaya city government efforts in providing pedestrian worthy for persons with disabilities by using four criteria of facilities and accessibility ie convenience, usability, safety and independence. Data collection techniques through observation, interview while data analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques include reduction, data, data presentation and conclusion. Based on the results of this study indicate that the benefits and objectives have not been fully achieved that 1. Principle of Convenience, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya already provides facilities for people with disability because the government provides facilities such as guiding tiles, ramps, sloped floors for disabled people to facilitate access to pedestrian . 2. Principle Usefulness, in the provision of pedestrian in the city of Surabaya is enough to create the use of pedestrian. This is because there are still pedestrian who switch function and not fully used by people with disability in the city of Surabaya. 3. The principle of safety, in providing pedestrian in the city of Surabaya facilities is sufficient to ensure the safety of people with disability because the facilities provided by the government still not fully meet the safety requirements are still found damaged pedestrian and pedestrian who have ramp. 4. Principle of

Independence, in the implementation of pedestrian is enough to provide independence for people with disability because in the implementation assisted by Satpol PP and Linmas Surabaya.

Keywords : *Effort, Pedestrian, Disability*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas pemenuhan dan perlindungan tentang kesejahteraan sosial masih memiliki kendala seperti perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan telah memiliki cukup banyak instrumen kebijakan sosial seperti kebijakan dalam program Pemerintah tentang penyandang disabilitas yang pada intinya mengatur tentang hak-hak orang dengan disabilitas, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa.

Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan unsur dari masyarakat yang mempunyai kelainan masalah kesehatan baik fisik, mental dan sosial. Oleh sebab itu penyandang disabilitas pada umumnya akan mengalami gangguan atau rintangan serta hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan seperti penurunan kemampuan fisik, emosional, mobilitas, berinteraksi sosial, tingkat kesehatan dan penurunan kemampuan yang lainnya, sehingga tidak semua penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan hidupnya bergantung pada bantuan keluarga maupun orang lain.

Pemerintah kurang menyadari bahwa penyandang disabilitas juga merupakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dapat diberdayakan untuk perkembangan diri mereka agar para penyandang disabilitas tersebut mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya, maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap prasarana dan sarana pelayanan umum, sehingga para penyandang disabilitas mampu melakukan segala aktivitasnya seperti orang normal. Sehubungan dengan itu, dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 8 disebutkan bahwa, Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dari UU No. 4 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa:

“Setiap kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”.

Dari undang-undang tersebut jelas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan dalam bidang mengakses hak aksesibilitas

dan fasilitas yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal sehingga mereka dapat melaksanakan kehidupan mereka dan dapat melaksanakan aktifitas sama dengan orang normal lainnya.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Lingkungan dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas.

Di Kota Surabaya belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum yang memadai bagi penyandang disabilitas. Sehubungan dengan itu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kecacatan Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah Daerah mengupayakan pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial. Dari ketentuan umum tersebut pemerintah Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar bagi setiap masyarakatnya tanpa terbatas apapun termasuk dalam hal mengakses fasilitas pelayanan bukan hanya masyarakat biasa melainkan juga penyandang disabilitas.

Di Kota Surabaya belum cukup memberikan fasilitas yang memungkinkan untuk penyandang disabilitas di Kota Surabaya para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan pedestrian. Melihat situasi dan kondisi Kota Surabaya yang mempunyai masyarakat disabilitas dan dalam upaya pemerintah kota Surabaya dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas demi menunjang kelangsungan hak hidup mereka salah satunya dengan menyediakan pedestrian yang ramah di Kota Surabaya. Para penyandang disabilitas, tampaknya belum atau kurang menyadari akan hak mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum, sehingga mereka mampu melaksanakan aktifitasnya sebagaimana orang normal lainnya dan masih sulitnya menikmati fasilitas umum di

Kota Surabaya khususnya pedestrian yang dibangun belum mencakup seluruh kota Surabaya selain itu juga pembangunannya terkendala oleh fasilitas jalan yang lain seperti terhalang fiber optic dan terkena lampu jalan dan hanya berpusat di pusat kota saja termasuk trotoar yang ada di Kota Surabaya.

Trotoar merupakan jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas kendaraan yang khusus digunakan pejalan kaki atau bisa juga disebut dengan pedestrian. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung pada volume pedestrian dan volume lalu lintas. Lebar trotoar yang digunakan pada umumnya berkisar antara 1,5 m - 3,0 m (Sukoco 2002:18). Lebar trotoar Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Volume Standart Trotoar pada Pedestrian

No	Lokasi Pengadaan Trotoar	Lebar Trotoar Minimal
1	Jalan di daerah perkotaan	4,00 meter
2	Di wilayah perkantoran utama	3,00 meter
3	Di wilayah industri	
	a. Pada jalan primer	3,00 meter
	b. Pada jalan akses	2,00 meter
4	Di wilayah pemukiman	
	a. Pada jalan primer	2,75 meter
	b. Pada jalan akses	2,00 meter

Sumber: Direktorat Jendral Bina Marga 1999

Di Kota Surabaya konsep pedestrian yang dibangun adalah untuk menciptakan pedestrian yang mempunyai fungsi sebagai bagian pelengkap jalan yang memenuhi nilai-nilai artistik dan estetika serta berwawasan lingkungan. Dari pernyataan diatas masalah yang sangat kompleks yang melingkupi penyandang disabilitas tersebut mengenai hak akses khususnya pada penyediaan pedestrian yang layak di Kota Surabaya. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyediaan Pedestrian yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya."

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan yang meliputi empat asas Fasilitas dan Aksesibilitas yaitu Asas Kemudahan, Kegunaan, Keselamatan dan Kemandirian dengan menggunakan teknik *Puposive Sampling*. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian "Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyediaan Pesestrian yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya" dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan maka dapat digunakan Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Peneydiaan Pedestrian yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan yang meliputi empat kriteria asas Fasilitas dan Aksesibilitas yaitu Asas Kemudahan, Kegunaan, Keselamatan dan Kemandirian berikut penjelasanya:

1.Asas Kemudahan

Program penyediaan pedestrian di Kota Surabaya bahwa pelaksanaan pembenahan pedestrian untuk penyandang disabilitas sudah memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas, karena dengan adanya pedestrian untuk penyandang disabilitas ini dapat membantu agar penyandang disabilitas tidak kesulitan dalam mengakses fasilitas yang berkaitan dengan pedestrian pejalan kaki yang diberikan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan yaitu telah disediakannya ramp

Gambar 1.1
Gambar Ramp dan Lantai Landai Untuk
Menunjang Keselamatan Penyandang Disabilitas
di Taman Bungkul



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Selain itu juga ada ubin pemandu, dan lantai landai. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses pedestrian untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka, beberapa kendala masih ditemukan seperti masih ada pedestrian yang masih belum memenuhi syarat, masih adanya pedestrian yang rusak dan jalur pemandu yang berpusat pada pusat koya lalu masih ada ubin pemandu yang menabrak pohon dan pedestrian yang belum sesuai standart. Selain kendala dari lapangan juga terkadang masih ada kendala dari pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, yaitu masih terhambat oleh anggaran dan masih berpusat di pusat kota saja yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga belum mencakup ke semua Kota Surabaya

2. Asas Kegunaan

Penyediaan pedestrian di Kota Surabaya bahwa pelaksanaan program pembangunan pedestrian sudah sesuai dengan kegunaan dan sesuai dengan fungsinya, tetapi juga masih ditemukan pedestrian yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Hal tersebut dapat dilihat masih ditemukan di Surabaya utara bahwa pedestrian masih digunakan untuk berjualan Pedagang Kaki Lima.

Gambar 1.2
Gambar fasilitas pedestrian yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya di Jalan Gembong



Sumber : Dokumentasi Peneliti

serta masih adanya pedestrian yang rusak dan tidak terawat karena digunakan untuk lahan parkir. Juga banyak ditemukan pedestrian yang berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Fasilitas trotoar yang sudah ada, ternyata beralih fungsi menjadi berbagai aktivitas lain (seperti transaksi pedagang kaki lima, parkir).

Gambar 1.3
Gambar fasilitas pedestrian yang tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya di Jalan Stasiun Kota



Sumber : Dokumentasi Peneliti

tempat-tempat bangunan permanen maupun non permanen yang sangat mengganggu lalu lintas pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas, sehingga trotoar tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, dan pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan jalur kendaraan bermotor.

3. Asas Keselamatan

Penyediaan Pedestrian yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam menunjang keselamatan untuk pengguna pedestrian khususnya penyandang disabilitas sudah diupayakan agar memang benar menciptakan keamanan dan keselamatan dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus dalam penyediaan pedestrian. Terkait pembangunan pedestrian yang masih belum merata, di Kota Surabaya masih ditemukan beberapa tempat yang belum mengalami pembenahan pedestrian karena yang diutamakan dari pembenahan tersebut adalah jalur protokol atau jalur inti terlebih

dahulu. Sehingga masih terdapat beberapa tempat di Kota Surabaya khususnya di daerah perbatasan kota yang mana pembenahan itu sangat penting bagi pejalan kaki ataupun penyandang disabilitas. Masih ditemukan kendala terkait pelaksanaan penyediaan pedestrian, pedestrian di Kota Surabaya sudah dibenahi dan diperbaiki agar ramah untuk penyandang disabilitas tetapi pada kenyataannya masih ditemukan pedestrian yang belum memenuhi kriteria keselamatan pedestrian yang masih bergelombang, ubin pemandu terputus rusak.

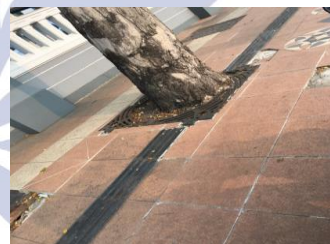
Gambar 1.4
Pedestrian yang belum memenuhi standar keselamatan di jalan dharmahusada Surabaya



Sumber : dokumentasi peneliti

Selain itu juga ditemukan pedestrian yang masih menabrak pohon.

Gambar 1.5
Pedestrian yang masih belum memenuhi standar keselamatan di Jalan Rajawali



Sumber : dokumentasi peneliti

Pemerintah Kota Surabaya sudah memberikan semua fasilitas untuk penyandang disabilitas dan semuanya teralisasi tetapi bila dilihat dari tahun pertama pembangunan pedestrian sampai sekarang tergolong masih lambat karena dengan jarak waktu sepuluh tahun belum semua pedestrian mencakup Kota Surabaya. Itu menjadi kendala akan kebijakan pemerintah dalam program pembangunan pedestrian untuk penyandang disabilitas.

4. Asas Kemandirian

Upaya pemerintah agar menciptakan kemandirian penyandang disabilitas adalah tidak dengan hanya memberikan fasilitas pada pedestrian tetapi juga mengawasi dengan dibantu OPD terkait seperti satpol pp dan linmas di Kota Surabaya karena pemerintah meyakini bahwa penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya mandiri dalam melakukan aktivitasnya sekalipun sudah diberikan fasilitas yang memadai karena mereka memiliki keterbatasan sehingga tujuan pemerintah mengarahkan Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya adalah untuk

mempermudah penyandang disabilitas yang kesusahan mengakses fasilitas di Kota Surabaya tidak hanya pada pedestrian saja tetapi semua fasilitas di Kota Surabaya dibantu dan diawasi dengan Satpol PP dan Linmas. Terkait dengan kemandirian penyandang disabilitas juga harus memiliki rasa nyaman ketika melewati pedestrian dan trotoar yang ada di Kota Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dari penelitian Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penyediaan Pedestrian yang Layak Bagi Penyandang disabilitas di Kota Surabaya dengan menggunakan empat kriteria asas aksesibilitas dan fasilitas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan sehingga dapat disimpulkan masing – masing kriteria sebagai berikut:

Untuk kriteria kemudahan sudah dapat dikatakan sudah memberikan kemudahan bahwa pemerintah kota Surabaya sudah mewujudkan hak penyandang disabilitas dengan memberikan kemudahan dalam fasilitas pelayanan publik khususnya mengenai pedestrian. Dalam penyediaan pedestrian secara umum yaitu untuk memberikan hak yang seharusnya diberikan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pejalan kaki yang memperhatikan kemudahannya sehingga perbedaannya juga dapat dirasakan penyandang disabilitas lebih terbantu dengan adanya ramp, ubin yang landai, jalur pemandu dan ubin pemandu yang telah disediakan pemerintah kota Surabaya. Maka kehadiran pedestrian yang baik menjadi penting adanya karena dapat berperan antara lain, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, mempermudah aksesibilitas sehingga menambah pengguna atau khususnya penyandang disabilitas terhadap kegiatan – kegiatan penyandang disabilitas.

Untuk kriteria kegunaan dapat dikatakan masih belum sepenuhnya berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari narasumber pelaksana penyediaan pedestrian di Kota Surabaya bahwa pedestrian bagi penyandang disabilitas sudah sepenuhnya berfungsi sesuai dengan kegunaannya dan tidak beralih fungsi tetapi pada kenyataannya ditemukan pedestrian yang belum mendapat perhatian bahwa masih ada pedestrian yang rusak, masih ada yang beralih fungsi digunakan sebagai tempat berjualan Pedagang Kaki Lima, masih ada yang menggunakan sebagai tempat parkir. Semua itu dapat menjadi penghambat pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas untuk mengakses pedestrian dan mengurangi kenyamanan siapapun yang menggunakan pedestrian tersebut. Meskipun dengan pemberian CCTV tetapi hal tersebut masih belum bisa menciptakan perubahan akan fungsi pedestrian.

Untuk kriteria keselamatan dapat dikatakan sudah cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas pada pedestrian yang sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan penyandang disabilitas dengan adanya pembatas-pembatas yang ada pada pedestrian sehingga pengendara motor tidak dapat naik ke trotoar pedestrian.

Diberikannya lantai yang landai juga dapat memberikan keselamatan dan keamanan penyandang disabilitas dalam memakai kursi roda dimana bila tidak ada lantai landai atau turunan maka akan membahayakan penyandang disabilitas bisa terpelesok atau jatuh. Meskipun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan pedestrian yang tidak layak untuk diakses khususnya bagi penyandang disabilitas. Untuk kriteria kemandirian dapat dikatakan sudah cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan simbol-simbol yang ada pada pedestrian untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat berjalan sesuai dengan pemandu simbol yang diberikan, tetapi dalam pelaksanaannya pada pusat kota Surabaya penyandang disabilitas tersebut tidak dibiarkan sendiri dalam menggunakan jalur pedestrian melainkan juga dibantu oleh linmas dan Satpol PP untuk mengawasi dan membantu penyandang disabilitas apabila ingin naik turun ke trotoar dan akan menjaga keselamatan penyandang disabilitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penyediaan Pedestrian yang Layak Bagi Penyandang disabilitas di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penyediaan pedestrian di kota Surabaya khususnya untuk penyandang disabilitas diupayakan agar pedestrian dapat mencakup seluruh kota Surabaya dan pembangunannya diupayakan untuk bias bertahap dari kota lalu ke pinggiran jadi tidak berpusat pada pusat kota saja.
2. Dalam kegunaan pedestrian untuk pejalan kaki baiknya dilakukan penertiban karena masih ditemukan pedestrian yang tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
3. Untuk mencapai tujuan dalam penyediaan pedestrian kepada penyandang disabilitas diupayakan agar jalur pemandu lebih ditonjolkan lagi karena masih ada ubin pemandu yang terputus dan langsung di bawah trotoar. Diharapkan pemerintah dapat memberikan inovasi seperti penambahan ornamen pada ubin pemandu agar lebih menonjol terkait pedestrian untuk penyandang disabilitas.
4. Dari beberapa fasilitas yang telah disediakan pemerintah kota Surabaya terkait pedestrian seperti ramp, jalur pemandu, lantai landai diharapkan agar lebih memperhatikan fasilitas yang sudah tersedia.
5. Diharapkan untuk pemerintah kota Surabaya agar melakukan perawatan secara berkala pada fasilitas pedestrian agar pedestrian tetap dalam kondisi baik dan dapat terus digunakan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih setulus tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA
- b. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing

- c. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. selaku dosen penguji
- d. Muhammad Farid Ma'ruf yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

Anngriani, Niniek Tahun 2009. *Padestrian Ways dalam Perencanaan Kota*

Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. LP3ES. Jakarta

Edie Suharto, Ph. D. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan Sosial*

Fadhil Nurdin, 2001. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*

Haryanto, dkk. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintah. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen*

Nanang Martono, 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*.

Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Panduan tentang Layanan Aksesibilitas Tahun 2016

Rasyid. 1998. *Pemerintah Yang Amanah*. Jakarta: Binarena Pariwara

Sunaryo, 2017. *Etika berbasis Kebebasan Amartya Sen. Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 Tentang Asas-Asas Fasilitas dan Aksesibilitas.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kecacatan.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang - Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

